



Pengaruh Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak Dan Efisiensi Anggaran Terhadap Daya Beli Masyarakat Kecamatan Pangkah

Intan Nur Faoziah¹, Dumadi², Anisa Sains Kharisma³, Nasiruddin⁴, Roni⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Muhadi Setiabudi, Brebes

¹intanfaoziah2563@gmail.com, ²dumadi_adi@yahoo.co.id, ³anisasains08@gmail.com, ⁴nasir.brebes@gmail.com, ⁵roni.umus18@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the effects of the Non-Taxable Income Policy (PTKP) and Budget Efficiency on the purchasing power of the community in Pangkah District. The study is motivated by the importance of purchasing power as an indicator of economic welfare influenced by taxation policy, budget management, household income, and changes in the prices of essential goods. A quantitative survey approach was employed. The population consisted of 120,552 residents of Pangkah District, while a sample of 400 respondents was determined using the Slovin formula. Data were collected through questionnaires, documentation, and a literature review and were analyzed using validity and reliability tests, classical assumption tests, multiple linear regression, t-tests, an F-test, and the coefficient of determination with IBM SPSS. The results show that the PTKP Policy partially has a significant effect on purchasing power, with a significance value of 0.005, although the direction of the relationship is negative. Budget Efficiency partially has no significant effect, with a significance value of 0.167. Simultaneously, the PTKP Policy and Budget Efficiency significantly affect purchasing power, with a significance value of 0.004. The coefficient of determination of 0.057 indicates that both variables explain 5.7% of the variation in purchasing power, while 94.3% is influenced by other factors. These findings confirm that community purchasing power is a complex phenomenon influenced not only by the PTKP Policy and budget efficiency but also by income, inflation, prices of essential goods, education, and household economic conditions.

Keywords: Non-Taxable Income Policy (PTKP), Budget Efficiency, Public Purchasing Power

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Efisiensi Anggaran terhadap Daya Beli Masyarakat Kecamatan Pangkah. Penelitian dilatarbelakangi oleh pentingnya daya beli sebagai indikator kesejahteraan ekonomi yang dipengaruhi oleh kebijakan perpajakan, pengelolaan anggaran, pendapatan, dan perubahan harga kebutuhan masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Populasi penelitian adalah masyarakat Kecamatan Pangkah sebanyak 120.552 jiwa, sedangkan sampel berjumlah 400 responden yang ditentukan menggunakan rumus Slovin. Data dikumpulkan melalui kuesioner, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisis menggunakan uji validitas, reliabilitas, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinasi dengan bantuan IBM SPSS. Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kebijakan PTKP secara parsial berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dengan nilai signifikansi 0,005, tetapi memiliki arah hubungan negatif. Efisiensi Anggaran secara parsial tidak berpengaruh signifikan dengan nilai signifikansi 0,167. Secara simultan, Kebijakan PTKP dan Efisiensi Anggaran berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dengan nilai signifikansi 0,004. Nilai koefisien determinasi sebesar 0,057 menunjukkan bahwa kedua variabel menjelaskan 5,7% variasi daya beli, sedangkan 94,3% dipengaruhi faktor lain. Temuan ini menegaskan bahwa daya beli masyarakat merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya ditentukan oleh kebijakan PTKP dan efisiensi anggaran, tetapi juga oleh pendapatan, inflasi, harga kebutuhan pokok, pendidikan, serta kondisi ekonomi rumah tangga.

Kata Kunci: Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), Efisiensi Anggaran, Daya Beli Masyarakat.

1. Pendahuluan

Kebijakan fiskal merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan pemerintah untuk menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu bentuk kebijakan fiskal yang berpengaruh langsung terhadap kondisi ekonomi rumah tangga adalah kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yaitu batas minimum penghasilan yang tidak dikenakan pajak sehingga memengaruhi besarnya pendapatan yang dapat digunakan untuk konsumsi. Triyandari Nugroho dan Desy Anugraheni (2022) menyatakan bahwa peningkatan PTKP mampu menurunkan beban pajak wajib pajak orang pribadi sehingga pendapatan yang tersedia untuk konsumsi menjadi lebih besar. Sejalan dengan itu, Wulandari et al. (2025) menyatakan bahwa kebijakan perpajakan yang baik berperan dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat melalui peningkatan pendapatan yang dapat dibelanjakan. Dengan demikian, PTKP tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perpajakan, tetapi juga sebagai kebijakan yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan memperkuat daya beli masyarakat.

Pengaruh Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan Efisiensi Anggaran terhadap Daya Beli Masyarakat Kecamatan Pangkah

Selain kebijakan PTKP, efektivitas kebijakan fiskal juga ditentukan oleh efisiensi pengelolaan anggaran pemerintah. Efisiensi anggaran mencerminkan kemampuan pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya publik secara tepat sasaran sehingga menghasilkan manfaat yang optimal bagi masyarakat. Ahmad Wahyudi Zein et al. (2025) menyatakan bahwa pengelolaan anggaran yang efektif mampu mengarahkan belanja publik pada program-program prioritas yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, Muslimin et al. (2025) menjelaskan bahwa efisiensi anggaran ditunjukkan oleh kemampuan pemerintah menghasilkan keluaran yang maksimal dengan penggunaan sumber daya yang optimal tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik. Sementara itu, Rahyono (2023) menegaskan bahwa alokasi anggaran yang tepat, terutama pada sektor pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan sekaligus memperkuat daya beli masyarakat.

Daya beli masyarakat merupakan indikator penting yang menggambarkan kemampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan melalui konsumsi barang dan jasa. Menurut Badan Pusat Statistik (2022), daya beli tercermin dari kemampuan rumah tangga memenuhi kebutuhan dasar sesuai pola konsumsi yang berlaku. Tingkat daya beli dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti pendapatan, tingkat harga, dan kebijakan pemerintah. Wulandari et al. (2025) menyatakan bahwa kebijakan fiskal, baik melalui perpajakan maupun pengeluaran pemerintah, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemampuan belanja masyarakat. Di sisi lain, Angraeni et al. (2025) menunjukkan bahwa tekanan ekonomi, khususnya inflasi, dapat menurunkan daya beli akibat meningkatnya harga barang dan jasa. Oleh karena itu, peningkatan pendapatan melalui kebijakan PTKP yang tepat serta pengelolaan anggaran yang efisien menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas daya beli masyarakat.

Fenomena perubahan daya beli masyarakat di Indonesia dapat diamati dari berbagai kebijakan fiskal yang diterapkan pemerintah. Salah satu contohnya adalah kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 11% yang memunculkan kekhawatiran terhadap penurunan kemampuan belanja, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan menengah ke bawah (Asri H., 2025). Selain itu, Febrisha (2023) menunjukkan bahwa perubahan kebijakan perpajakan dan tingkat pendapatan memberikan pengaruh terhadap daya beli masyarakat. Untuk menjaga daya beli, pemerintah juga melaksanakan berbagai program yang didanai melalui anggaran negara, seperti bantuan sosial dan subsidi. Namun, efektivitas program-program tersebut sangat bergantung pada efisiensi pengelolaan anggaran dan ketepatan sasaran sehingga manfaat yang diterima masyarakat dapat optimal.

Kondisi tersebut juga relevan dengan masyarakat di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, yang mayoritas bekerja pada sektor perdagangan, pertanian, buruh, dan usaha kecil, sehingga kondisi ekonominya sangat dipengaruhi oleh perubahan harga kebutuhan pokok, tingkat pendapatan, serta kebijakan fiskal pemerintah. Masyarakat berpendapatan menengah ke bawah cenderung lebih rentan terhadap perubahan kebijakan perpajakan maupun pengelolaan anggaran, terlebih dengan meningkatnya harga kebutuhan pokok dalam beberapa tahun terakhir yang semakin menekan kemampuan konsumsi rumah tangga. Oleh karena itu, kebijakan PTKP dan efisiensi anggaran pemerintah dipandang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi sekaligus meningkatkan kemampuan belanja masyarakat di Kecamatan Pangkah. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan efisiensi anggaran pemerintah terhadap kemampuan belanja masyarakat di Kecamatan Pangkah.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, karena wilayah tersebut memiliki karakteristik sosial dan ekonomi yang beragam, baik dari sisi tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, maupun pola konsumsi masyarakat. Mayoritas penduduk bekerja di sektor pertanian, perdagangan, industri kecil dan menengah, serta sektor informal, sehingga dinilai representatif untuk mengkaji hubungan antara kebijakan fiskal pemerintah dengan kondisi ekonomi masyarakat, khususnya daya beli. Selain itu, Kecamatan Pangkah memiliki aktivitas ekonomi yang berkembang sehingga relevan untuk menganalisis dampak kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan efisiensi anggaran pemerintah terhadap kemampuan belanja masyarakat. Penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Juni 2026 dengan mempertimbangkan kemudahan akses data, keterjangkauan lokasi, serta kesesuaian karakteristik responden dengan kriteria penelitian. Subjek penelitian ini merupakan masyarakat Kecamatan Pangkah yang memiliki penghasilan dan melakukan aktivitas konsumsi, karena kelompok ini berkaitan langsung dengan penerapan kebijakan PTKP serta menjadi penerima manfaat belanja pemerintah. Sementara itu, objek penelitian meliputi tiga variabel utama, yaitu kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai variabel independen pertama (X_1), efisiensi anggaran pemerintah sebagai variabel independen kedua (X_2), dan daya beli masyarakat sebagai variabel dependen (Y). Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh masing-masing variabel independen maupun pengaruhnya secara simultan terhadap daya beli masyarakat di Kecamatan Pangkah.

Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian deskriptif dan asosiatif. Pendekatan kuantitatif dipilih karena data diperoleh dalam bentuk angka melalui penyebaran kuesioner kepada responden, kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik untuk menguji hipotesis secara objektif. Sifat deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kebijakan PTKP, efisiensi anggaran pemerintah, dan daya beli

masyarakat berdasarkan persepsi responden, sedangkan sifat asosiatif bertujuan menguji hubungan dan pengaruh antarvariabel. Pengumpulan data dilakukan dengan metode survei, sedangkan analisis data menggunakan regresi linear berganda untuk menguji pengaruh kebijakan PTKP dan efisiensi anggaran pemerintah terhadap daya beli masyarakat sesuai dengan hipotesis penelitian.

2.1. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pangkah, Kabupaten Tegal. Menurut Sugiyono et al. (2021), populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Berdasarkan data Kecamatan Pangkah Tahun 2025, jumlah penduduk mencapai 120.552 jiwa yang tersebar di 23 desa. Karakteristik masyarakat yang beragam, baik dari segi tingkat pendapatan, jenis pekerjaan, maupun kondisi ekonomi, menjadikan Kecamatan Pangkah representatif untuk mengkaji pengaruh kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan efisiensi anggaran pemerintah terhadap daya beli masyarakat.

Sampel penelitian merupakan bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili karakteristik keseluruhan populasi. Penentuan jumlah sampel menggunakan rumus Slovin dengan tingkat kesalahan (error margin) sebesar 5%. Berdasarkan jumlah populasi sebanyak 120.552 jiwa, diperoleh hasil perhitungan sebanyak 398,68 responden yang kemudian dibulatkan menjadi 400 responden. Jumlah sampel tersebut dinilai memadai untuk merepresentasikan populasi sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi masyarakat Kecamatan Pangkah secara lebih akurat.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Adapun kriteria responden meliputi masyarakat yang berdomisili di Kecamatan Pangkah, memiliki penghasilan tetap maupun tidak tetap, berusia minimal 17 tahun atau telah menikah, serta bersedia menjadi responden penelitian. Teknik ini dipilih agar responden yang terlibat memiliki karakteristik yang relevan dengan variabel penelitian, sehingga mampu memberikan informasi yang tepat mengenai pengaruh kebijakan PTKP dan efisiensi anggaran pemerintah terhadap daya beli masyarakat.

2.2. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Definisi operasional variabel digunakan untuk mengubah konsep penelitian menjadi indikator-indikator yang dapat diukur secara objektif sehingga memudahkan proses pengumpulan dan analisis data. Menurut Sugiyono et al. (2021), definisi operasional bertujuan menjelaskan variabel penelitian ke dalam indikator yang dapat diukur secara empiris. Dalam penelitian ini, seluruh variabel diukur menggunakan skala Likert dengan lima kategori jawaban, yaitu 1 = Sangat Tidak Setuju (STS), 2 = Tidak Setuju (TS), 3 = Netral (N), 4 = Setuju (S), dan 5 = Sangat Setuju (SS).

Variabel penelitian merupakan atribut atau karakteristik suatu objek yang memiliki variasi tertentu untuk diteliti dan dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan. Menurut Sugiyono et al. (2021), penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu variabel independen (bebas) dan variabel dependen (terikat). Variabel independen merupakan variabel yang memengaruhi atau menyebabkan perubahan pada variabel dependen dan dalam model penelitian umumnya dinotasikan dengan simbol X. Dalam penelitian ini, variabel independen terdiri dari.

Tabel 1. Tabel Indikator Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (X_1)

Variabel	Definisi	Indikator
Literasi Keuangan (X_1) Dwi Indah Lestari (2024)	Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan menggunakan informasi serta produk keuangan secara efektif sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang tepat dan bijak.	1. Pengetahuan keuangan 2. Sikap keuangan 3. Ketrampilan keuangan
Gaya Hidup (X_2) (Wati et al., 2024)	Gaya hidup adalah pola yang ditunjukkan oleh individu melalui aktivitas, minat, dan opini secara umum sehingga dapat menunjukkan aktivitas rutin yang dilakukan, apa yang dipikirkan dan sejuah apa mereka peduli terhadap hal tersebut.	1. Aktivitas 2. Minat 3. Opini
Pengelolaan Keuangan Yasminudin (2024)	Pengelolaan keuangan merupakan pengaturan kegiatan keuangan dalam Suatu organisasi. pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan bisnis, pengelolaan kas, dan pengelolaan kegiatan keuangan.	1. Penggunaan anggaran 2. Pencatatan keuangan 3. Pelaporan keuangan
Penggunaan <i>Fintech Payment</i> (Z) Nuke Betharini (2023)	<i>Fintech payment</i> adalah sebuah sistem pembayaran yang menggunakan teknologi keuangan untuk memfasilitasi transaksi keuangan elektronik.	1. Kepercayaan 2. Kegunaan 3. Kemudahan pengguna

Tabel 2. Tabel Indikator Efisiensi Anggaran (X₁)

Variabel	Definisi	Indikator
Literasi Keuangan (X ₁) Dwi Indah Lestari (2024)	Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan menggunakan informasi serta produk keuangan secara efektif sehingga dapat membuat keputusan keuangan yang tepat dan bijak.	4. Pengetahuan keuangan 5. Sikap keuangan 6. Ketrampilan keuangan
Gaya Hidup (X ₂) (Wati et al., 2024)	Gaya hidup adalah pola yang ditunjukkan oleh individu melalui aktivitas, minat, dan opini secara umum sehingga dapat menunjukkan aktivitas rutin yang dilakukan, apa yang dipikirkan dan sejujurnya apa mereka peduli terhadap hal tersebut.	4. Aktivitas 5. Minat 6. Opini
Pengelolaan Keuangan Yasminudin (2024)	Pengelolaan keuangan merupakan pengaturan kegiatan keuangan dalam Suatu organisasi. pengelolaan keuangan meliputi kegiatan perencanaan bisnis, pengelolaan kas, dan pengelolaan kegiatan keuangan.	4. Penggunaan anggaran 5. Pencatatan keuangan 6. Pelaporan keuangan
Penggunaan <i>Fintech Payment</i> (Z) Nuke Betharini (2023)	<i>Fintech payment</i> adalah sebuah sistem pembayaran yang menggunakan teknologi keuangan untuk memfasilitasi transaksi keuangan elektronik.	4. Kepercayaan 5. Kegunaan 6. Kemudahan pengguna

2.3. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan berupa kuesioner tertutup yang disusun berdasarkan indikator dari setiap variabel penelitian. Masing-masing variabel dijabarkan ke dalam sejumlah pernyataan yang diukur menggunakan skala Likert. Penyusunan instrumen dilakukan secara sistematis melalui penentuan variabel dan indikator, penyusunan butir pernyataan, pengujian validitas dan reliabilitas, serta penyebaran kuesioner kepada responden. Instrumen yang digunakan harus memenuhi kriteria valid dan reliabel agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan layak dianalisis.

Uji validitas bertujuan untuk memastikan bahwa setiap butir pernyataan mampu mengukur konstruk yang seharusnya diukur. Pengujian dilakukan menggunakan korelasi Product Moment Pearson dengan bantuan perangkat lunak statistik seperti SPSS. Suatu item dinyatakan valid apabila nilai *r* hitung lebih besar dari *r* tabel dan memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05. Sebaliknya, apabila nilai *r* hitung lebih kecil dari *r* tabel, maka item tersebut dinyatakan tidak valid sehingga perlu diperbaiki atau dihilangkan.

Uji reliabilitas digunakan untuk menilai tingkat konsistensi instrumen dalam mengukur variabel penelitian. Pengujian dilakukan menggunakan koefisien Cronbach's Alpha, dengan ketentuan bahwa instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih dari 0,70. Sebaliknya, apabila nilai Cronbach's Alpha kurang dari 0,70, maka instrumen dianggap belum memiliki tingkat reliabilitas yang memadai dan memerlukan penyempurnaan sebelum digunakan dalam penelitian.

2.4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda untuk menguji pengaruh kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan efisiensi anggaran pemerintah terhadap daya beli masyarakat. Seluruh proses pengolahan data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 23 agar analisis dapat dilakukan secara lebih efisien, akurat, dan sistematis.

Tahap awal analisis meliputi analisis deskriptif dan uji kualitas data. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik responden serta kecenderungan jawaban terhadap setiap variabel penelitian melalui distribusi frekuensi, nilai rata-rata, dan persentase. Selanjutnya, uji kualitas data dilakukan melalui uji validitas dan uji reliabilitas untuk memastikan bahwa instrumen penelitian mampu mengukur variabel secara tepat dan konsisten.

Sebelum analisis regresi dilakukan, data terlebih dahulu diuji menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri atas uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Pengujian ini bertujuan memastikan data memenuhi persyaratan analisis regresi sehingga model yang dihasilkan bersifat valid dan bebas dari pelanggaran asumsi statistik.

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu kebijakan PTKP (X₁) dan efisiensi anggaran pemerintah (X₂), terhadap variabel dependen, yaitu daya beli masyarakat (Y). Model regresi ini memberikan informasi mengenai arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat, baik secara bersama-sama maupun berdasarkan koefisien regresi yang diperoleh.

Pengujian hipotesis dilakukan menggunakan uji *t* untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel secara parsial, uji *F* untuk menguji pengaruh kedua variabel secara simultan, serta koefisien determinasi (R²) untuk mengukur kemampuan model dalam menjelaskan variasi daya beli masyarakat. Melalui rangkaian analisis

tersebut, penelitian diharapkan menghasilkan temuan yang valid, reliabel, dan mampu menjelaskan pengaruh kebijakan PTKP serta efisiensi anggaran terhadap daya beli masyarakat secara ilmiah.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Responden

Kecamatan Pangkah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, yang terdiri atas 23 desa dengan jumlah penduduk sebanyak 120.552 jiwa pada tahun 2025. Wilayah ini memiliki potensi ekonomi yang cukup besar, didukung oleh persebaran penduduk yang relatif merata serta beragam mata pencaharian, seperti sektor pertanian, perdagangan, industri kecil dan menengah, jasa, dan sektor informal. Kondisi tersebut menciptakan variasi tingkat pendapatan dan daya beli masyarakat. Seiring dengan pembangunan daerah, berbagai fasilitas publik dan program pemerintah terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan karakteristik sosial ekonomi yang beragam, Kecamatan Pangkah menjadi lokasi yang tepat untuk mengkaji pengaruh Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan efisiensi anggaran pemerintah terhadap daya beli masyarakat.

Berdasarkan jenis kelamin, dari total 400 responden terdapat 282 responden (70,5%) berjenis kelamin perempuan dan 118 responden (29,5%) berjenis kelamin laki-laki. Hasil ini menunjukkan bahwa penelitian didominasi oleh responden perempuan sehingga partisipasi perempuan dalam penelitian mengenai kebijakan PTKP, efisiensi anggaran, dan daya beli masyarakat lebih besar dibandingkan laki-laki.

Ditinjau dari usia, mayoritas responden berada pada kelompok umur 21–25 tahun sebanyak 254 orang (63,5%), diikuti usia 26–30 tahun sebanyak 82 orang (20,5%), usia di atas 30 tahun sebanyak 38 orang (9,5%), dan usia 17–20 tahun sebanyak 26 orang (6,5%). Komposisi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden berada pada usia produktif yang umumnya telah memiliki pengalaman dalam mengelola keuangan dan aktivitas konsumsi.

Berdasarkan pekerjaan, responden didominasi oleh buruh sebanyak 193 orang (48,3%), disusul pegawai swasta sebanyak 107 orang (26,8%). Selebihnya terdiri atas wiraswasta 34 orang (8,5%), mahasiswa 32 orang (8,0%), ibu rumah tangga 26 orang (6,5%), dan pegawai negeri 8 orang (2,0%). Hal tersebut mencerminkan bahwa mayoritas responden berasal dari kelompok pekerja dengan karakteristik ekonomi yang beragam.

Dilihat dari tingkat penghasilan, sebagian besar responden memiliki pendapatan antara Rp2.000.000 hingga Rp4.000.000 per bulan, yaitu sebanyak 273 orang (68,3%). Responden dengan penghasilan di bawah Rp2.000.000 berjumlah 87 orang (21,8%), sedangkan sisanya memiliki penghasilan di atas Rp4.000.000 dengan proporsi yang relatif kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa mayoritas responden berada pada kelompok pendapatan menengah.

Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar responden merupakan lulusan SMA/SMK sebanyak 318 orang (79,4%). Responden dengan pendidikan Sarjana berjumlah 41 orang (10,2%), Diploma 34 orang (8,5%), SMP/MTs 6 orang (1,5%), dan SD/MI hanya 1 orang (0,5%). Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memiliki latar belakang pendidikan menengah.

Berdasarkan alamat, responden berasal dari seluruh 23 desa di Kecamatan Pangkah sehingga penyebaran sampel dinilai cukup representatif. Responden terbanyak berasal dari Desa Pangkah sebanyak 30 orang (7,5%), diikuti Balamoa sebanyak 25 orang (6,3%) dan Bedug sebanyak 21 orang (5,3%), sedangkan jumlah responden paling sedikit berasal dari Desa Dukuhjati Kidul sebanyak 14 orang (3,5%). Sebaran ini menggambarkan bahwa penelitian telah mencakup berbagai wilayah di Kecamatan Pangkah secara merata.

3.2. Pengujian Instrumen Penelitian

1. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menilai kemampuan setiap butir pernyataan dalam mengukur variabel penelitian secara tepat. Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel, di mana item dinyatakan valid apabila r hitung $>$ r tabel. Dengan jumlah sampel sebanyak 400 responden, diperoleh derajat kebebasan (df) sebesar 398 dan nilai r tabel pada taraf signifikansi 5% sebesar 0,0981, yang menjadi dasar dalam menentukan validitas setiap item pernyataan.

Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

Pernyataan	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan PTKP (X1)			
X1.1	0,661	0,0981	Valid
X2.2	0,751	0,0981	Valid
X3.3	0,688	0,0981	Valid
X4.4	0,791	0,0981	Valid
X5.5	0,640	0,0981	Valid
X6.6	0,629	0,0981	Valid
X7.7	0,756	0,0981	Valid
Hasil Uji Validitas Variabel Efisiensi Anggaran (X2)			

X2.1	0,675	0,0981	Valid
X2.2	0,704	0,0981	Valid
X2.3	0,710	0,0981	Valid
X2.4	0,635	0,0981	Valid
X2.5	0,737	0,0981	Valid
X2.6	0,228	0,0981	Valid
X2.7	0,622	0,0981	Valid
Hasil Uji Validitas Variabel Daya Beli (Y)			
Y.1	0,782	0,0981	Valid
Y.2	0,754	0,0981	Valid
Y.3	0,797	0,0981	Valid
Y.4	0,779	0,0981	Valid
Y.5	0,788	0,0981	Valid
Y.6	0,749	0,0981	Valid
Y.7	0,717	0,0981	Valid

Hasil pengujian menunjukkan bahwa seluruh item pada variabel Kebijakan PTKP (X1) dan Efisiensi Anggaran (X2) memiliki nilai r hitung yang lebih besar daripada r tabel. Nilai r hitung pada variabel X1 berada pada rentang 0,629–0,791, sedangkan pada variabel X2 berkisar antara 0,228–0,737. Dengan demikian, seluruh butir pernyataan pada kedua variabel tersebut dinyatakan valid dan layak digunakan sebagai instrumen penelitian.

Hasil uji validitas pada variabel Daya Beli (Y) juga menunjukkan bahwa seluruh item memenuhi kriteria validitas, dengan nilai r hitung berkisar antara 0,717–0,797, yang seluruhnya lebih besar dari r tabel sebesar 0,0981. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen penelitian pada variabel Kebijakan PTKP, Efisiensi Anggaran, dan Daya Beli telah memenuhi persyaratan uji validitas sehingga dapat digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk menilai konsistensi instrumen penelitian dalam mengukur setiap variabel, dengan kriteria instrumen dinyatakan reliabel apabila memiliki nilai Cronbach's Alpha lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kebijakan PTKP (X1) memperoleh nilai Cronbach's Alpha sebesar 0,829, Efisiensi Anggaran (X2) sebesar 0,728, dan Daya Beli Masyarakat (Y) sebesar 0,882. Seluruh nilai tersebut berada di atas batas minimal reliabilitas, sehingga dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dan layak digunakan sebagai alat pengumpulan data pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Standar Reliabilitas	Keterangan
Kebijakan PTKP (X1)	0,829	0,60	Reliabel
Efisiensi Anggaran (X2)	0,728	0,60	Reliabel
Daya Beli Masyarakat (Y)	0,882	0,60	Reliabel

3.3. Pengujian Asumsi Klasik

3.3.1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan kriteria data berdistribusi normal apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Berdasarkan hasil pengujian terhadap 400 responden, diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,072 dan Monte Carlo Sig. (2-tailed) sebesar 0,410, yang keduanya lebih besar dari 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa data residual berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi dan model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 5. Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		400
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.53261567
Most Extreme Differences	Absolute	.043
	Positive	.043
	Negative	-.037
Test Statistic		.043
Asymp. Sig. (2-tailed)		.072 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.	.410 ^d
	95% Confidence Interval	Lower Bound
		Upper Bound

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12558>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

3.3.2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas dilakukan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan yang kuat antarvariabel independen dalam model regresi, dengan kriteria nilai Tolerance > 0,10 dan VIF < 10. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1) dan Efisiensi Anggaran (X2) masing-masing memiliki nilai Tolerance sebesar 0,271 dan VIF sebesar 3,686. Karena seluruh nilai telah memenuhi kriteria yang ditetapkan, dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas dari gejala multikolinearitas, sehingga kedua variabel independen layak digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
(Constant)	4.018	.848	—	4.741	.000	-	
Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak	-.077	.058	-.078	-1.322	.187	.271	3.686
Efisiensi Anggaran	.974	.067	.855	14.443	.000	.271	3.686

3.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan menggunakan uji Glejser untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan varians residual dalam model regresi, dengan kriteria model dinyatakan bebas dari heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1) memiliki nilai signifikansi sebesar 0,245, sedangkan Efisiensi Anggaran (X2) sebesar 0,439. Karena kedua nilai tersebut lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga asumsi homogenitas varians telah terpenuhi dan model layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
(Constant)	4.988	1.039	-	4.801	.000	-	-
Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak	-.076	.065	-.155	-1.167	.245	.286	3.493
Efisiensi Anggaran	-.062	.080	-.103	-.775	.439	.286	3.493

3.3.4. Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen bersifat linear. Pengujian dilakukan dengan melihat nilai signifikansi pada hasil uji linearitas, di mana hubungan dinyatakan linear apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05. Hasil pengujian pada variabel Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (X1) menunjukkan nilai signifikansi linearitas sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan linear antara kebijakan PTKP dan daya beli masyarakat.

Hasil uji linearitas pada variabel Efisiensi Anggaran (X2) juga menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, hubungan antara efisiensi anggaran dan daya beli masyarakat dinyatakan linear. Berdasarkan hasil tersebut, kedua variabel independen telah memenuhi asumsi linearitas sehingga layak digunakan dalam analisis regresi linier berganda.

Tabel 8. Hasil Uji Linieritas (X1)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Daya Beli Masyarakat Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak	Between Groups	(Combined)	7056.404	28	252.014	15.224	.000
		Linearity	5602.162	1	5602.162	338.426	.000
		Deviation from Linearity	1454.242	27	53.861	3.254	.000
	Within Groups		6141.374	371	16.554		
	Total		13197.778	399			

Tabel 9. Hasil Uji Linieritas (X2)

			Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Daya Beli Masyarakat	Between Groups	(Combined)	8853.165	28	316.184	27.000	.000
		Linearity	8196.592	1	8196.592	699.932	.000

Efisiensi Anggaran		Deviation from Linearity	656.573	27	24.318	2.077	.002
	Within Groups		6141.374	4344.613	371	11.711	
	Total		13197.778	13197.778	399		

3.4. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Efisiensi Anggaran terhadap Daya Beli Masyarakat di Kecamatan Pangkah. Hasil analisis menunjukkan nilai konstanta sebesar 4,018, koefisien regresi variabel Kebijakan PTKP (X1) sebesar -0,077 dengan nilai signifikansi 0,187 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Sementara itu, variabel Efisiensi Anggaran (X2) memiliki koefisien regresi sebesar 0,974 dengan nilai signifikansi 0,000 ($< 0,05$), yang menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap daya beli masyarakat. Dengan demikian, efisiensi anggaran memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan kebijakan PTKP dalam menjelaskan perubahan daya beli masyarakat pada penelitian ini.

Tabel 10. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
(Constant)	4.018	.848	-	4.741	.000
Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak	-.077	.058	-.078	-1.322	.187
Efisiensi Anggaran	.974	.067	.855	14.443	.000

3.5. Pengujian Hipotesis

3.5.1. Hasil Uji T

Berdasarkan hasil Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial dengan tingkat signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian menunjukkan bahwa Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) (X1) memiliki nilai t hitung sebesar -2,811 dengan nilai signifikansi 0,005 ($< 0,05$), sehingga berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat dengan arah hubungan negatif (koefisien regresi -0,033). Sementara itu, Efisiensi Anggaran (X2) memperoleh nilai t hitung sebesar 1,388 dan nilai signifikansi 0,167 ($> 0,05$), sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat. Dengan demikian, hanya variabel Kebijakan PTKP yang terbukti berpengaruh secara parsial terhadap daya beli masyarakat dalam penelitian ini.

Tabel 11. Hasil Uji T

Model	Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.	Collinearity Statistics Tolerance	VIF
(Constant)	.553	.187		2.951	.004		
Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak	-.033	.012	-.373	-2.811	.005	.286	3.493
Efisiensi Anggaran	.020	.014	-.184	1.388	.167	.286	3.493

3.5.2. Hasil Uji F

Hasil uji F Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen dengan taraf signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$). Hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar 5,650 dengan nilai signifikansi 0,004 ($< 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Efisiensi Anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Daya Beli Masyarakat. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinilai layak untuk menjelaskan hubungan antara variabel independen dan dependen, meskipun masih terdapat variasi daya beli yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian.

Tabel 12. Hasil Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	2.842	2	1.421	5.650	.004b
Residual	47.032	187	.252		

Total	49.874	189			
-------	--------	-----	--	--	--

3.5.3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 13. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error	Durbin-Watson
I	.239a	.057	.047	.50151	2.095

Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengukur kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil analisis menunjukkan nilai R Square sebesar 0,057, yang berarti Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Efisiensi Anggaran mampu menjelaskan 5,7% variasi Daya Beli Masyarakat, sedangkan 94,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Selain itu, nilai Durbin-Watson sebesar 2,095 berada pada kisaran 1,5–2,5, sehingga menunjukkan tidak adanya autokorelasi pada model regresi. Dengan demikian, model regresi telah memenuhi salah satu asumsi dasar dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

3.6. Pembahasan Penelitian

Berdasarkan hasil uji parsial, Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat di Kecamatan Pangkah, yang ditunjukkan oleh nilai signifikansi sebesar 0,005 ($< 0,05$). Meskipun demikian, koefisien regresi bernilai -0,033, sehingga hubungan yang terbentuk bersifat negatif. Temuan ini menunjukkan bahwa perubahan kebijakan PTKP dalam penelitian belum mampu meningkatkan daya beli masyarakat, yang diduga dipengaruhi oleh faktor lain seperti rendahnya pendapatan, inflasi, kenaikan harga kebutuhan pokok, dan kondisi ekonomi masyarakat. Sementara itu, variabel Efisiensi Anggaran memiliki koefisien regresi positif sebesar 0,020, namun tidak berpengaruh signifikan karena nilai signifikansinya 0,167 ($> 0,05$). Hal ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang lebih efisien belum menjadi faktor utama yang menentukan daya beli masyarakat.

Hasil uji simultan (Uji F) menunjukkan bahwa Kebijakan PTKP dan Efisiensi Anggaran secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat, dengan nilai F hitung sebesar 5,650 dan signifikansi 0,004 ($< 0,05$). Temuan ini menunjukkan bahwa kombinasi kebijakan perpajakan dan pengelolaan anggaran tetap memberikan kontribusi terhadap perubahan daya beli masyarakat, meskipun secara parsial hanya variabel PTKP yang menunjukkan pengaruh signifikan.

Meskipun model penelitian signifikan secara simultan, nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,057 menunjukkan bahwa kedua variabel hanya mampu menjelaskan 5,7% variasi daya beli masyarakat, sedangkan 94,3% sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Oleh karena itu, daya beli masyarakat tidak hanya ditentukan oleh kebijakan PTKP dan efisiensi anggaran, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial, seperti tingkat pendapatan, inflasi, harga kebutuhan pokok, pendidikan, dan kondisi ekonomi rumah tangga. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel-variabel tersebut agar mampu menjelaskan daya beli masyarakat secara lebih komprehensif.

4. Kesimpulan

Penelitian terhadap 400 responden menunjukkan bahwa Kebijakan Penghasilan Tidak Kena Pajak berpengaruh signifikan terhadap daya beli masyarakat Kecamatan Pangkah dengan signifikansi 0,005, tetapi arah hubungannya negatif. Efisiensi Anggaran tidak berpengaruh signifikan dengan signifikansi 0,167. Secara simultan, kedua variabel berpengaruh signifikan terhadap daya beli dengan signifikansi 0,004. Koefisien determinasi sebesar 0,057 menunjukkan bahwa Kebijakan PTKP dan Efisiensi Anggaran menjelaskan 5,7% variasi daya beli, sedangkan 94,3% dipengaruhi faktor lain. Oleh karena itu, daya beli perlu dianalisis melalui pendapatan, inflasi, harga kebutuhan pokok, pendidikan, serta kondisi ekonomi rumah tangga guna mendukung perumusan kebijakan pemerintah daerah secara komprehensif.

Reference

- Ahmad Wahyudi Zein, Muhammad Riski, & Allya Zahra Putri Nasution. (2025). Efisiensi Penggunaan Anggaran Publik dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Akuntansi, Dan Pajak*, 2(2), 109–118. <https://doi.org/10.61132/jieap.v2i2.1027>
- Angraeni, M., Uswatun, U., & Saiful, M. (2025). Analisis Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat. *Journal of Economics Development Research*, 1(3), 82–90. <https://doi.org/10.71094/joeder.v1i3.143>
- Asri H., P. S. (2025). Analisis Dampak Kenaikan Ppn 11% Terhadap Daya Beli Gen Z Di Bidang Kuliner. *Jurnal Ilmiah Cendekia Akuntansi*, 10(1), 2338–3593. <https://doi.org/10.32503/cendekiaakuntansi.v10i1.6600>
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Tegal. (2022). Kecamatan Pangkah Dalam Angka 2022.
- Berlianingtyas, P. A., Wijayanti, R., Purnomo, H., & Emawati, W. D. (2026). Pengaruh Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.
- Defira, B. D. (2025). Pengaruh Kenaikan Tarif Ppn Dan Sosualisasi Tarif Ppn Terhadap Daya Beli Masyarakat (Studi Empiris Mayarakat Kecamatan Larangan Kabupaten Brebes). 5, 391–402.
- Donna Amisa, Y., & Bambang Dwi Waryanto, R. (2020). PENGARUH UPAH MINIMUM DAN DAYA BELI MASYARAKAT SETIAP PROVINSI TERHADAP KENAikan PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP) PPH PASAL 21 DI INDONESIA. *Jurnal Unipasby*, 25, 19–27. <https://doi.org/10.36456/majeko.vol25.no2.a2932>

DOI: <https://doi.org/10.69693/ijmst.v4i2.12558>

Lisensi: Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

- Dumadi, Qur'an, N. I., & Mulyani, I. D. (2020). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1, 1–7.
- Dwi Safitri, M., Ayu Rosida, S., & Pertiwi, U. (n.d.). Pengaruh Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai Rokok terhadap Daya Beli Masyarakat di Jakarta Timur. <https://doi.org/10.31004/jptam.v9i2.30336>
- Febrisha. (2023). PENGARUH TARIF PPN 11% DAN TINGKAT PENDAPATAN SELAMA PANDEMI TERHADAP DAYA BELI MASYARAKAT. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 22, 8–16. <https://doi.org/10.32722/eb.v22i1.5761>
- Hal, N. D., Fadilah, A. D., Adinda, N. T., Rahma, M. M., Lauda, R. S., & Suminar, L. (2024). Dampak Kenaikan Tarif Ppn Terhadap Inflasi Dan Daya Beli Masyarakat Indonesia. 9(2), 67–78.
- Muslimin, M. I., Nusamuda Pratama, I., Ardiani, Y., Rahmania, S., Anjani, H., Imara, I. S., Jeriyah, A., & Samunawardin, M. (2025). Efisiensi dan Efektivitas Perencanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara di Era Digital : Studi Terhadap Transformasi Digitalisasi Fiskal di Indonesia. *Nusantara Hasana Journal*, 4(9), 90–100. <https://doi.org/10.59003/nhj.v4i9.1317>
- Mustika, M., Afdillah, W., Sartika, R., & Pangestoeti, W. (n.d.). Transparansi Anggaran Publik Dan Implikasinya Terhadap Efisiensi Penge-luaran Pemerintah Daerah. 02(04), 1245. <https://doi.org/10.62379/jiksp.v2i4.2881>
- Nutriningrum, A. (2016). Pengaruh Peningkatan (Ptkp), Kemudahan Pembuatan (Npwp), Pembebasan Fiskal Bagi Pemilik Npwp , Dan Pelaporan Pph Menggunakan E-Spt / E-Filing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2, 1–16.
- Rahmawati, Y. R. (2024). Keadilan Sosial dalam Pajak Progresif: Bagaimana Sistem Pajak Mempengaruhi Beban Warga Kaya dan Miskin di Indonesia. *Jurnal Riset Perpajakan*, 3, 47–56.
- Rahyono. (2023). Dampak Kebijakan Fiskal Terhadap Peningkatan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi*, 7(Vol. 7 No. 1 (2023): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting). <https://doi.org/10.31539/costing.v7i1.14183>
- Satria, W., Widodo, A., & Hilman, Y. A. (2025). Implementasi Kebijakan Perpajakan Ppn 12 % Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Era Ekonomi Digital. 4.
- Sugiyono, Dr., & Prof. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D (Edisi Terbaru). Bandung: Alfabeta. <https://id.scribd.com/document/834709749/sugiyono-2021>
- Syariah, M. B., & Hamfara, S. (2026). Dampak Kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (Ppn) Terhadap Daya Beli Masyarakat Dan Pan-dangan Ekonomi Islam Ferziyanna Acelia Arzala. 4(April), 1–7.
- Triyandari Nugroho, N., & Desy Anugraheni, B. (2022). Analisis Pengaruh Kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (Ptkp) Terhadap Pen-erimaan Pajak Penghasilan Dan Daya Beli Wajib Pajak Orang Pribadi (Wpop). *Jurnal Bismak*, 2(2). <https://doi.org/10.47701/bis-mak.v2i2.2151>
- Wati, E. J., Sari, M. I., Hidayattullah, Y., Islam, U., Raden, N., Lampung, I., & Lampung, B. (2025). Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Indonesia : Tinjauan Literatur Dampak Inflasi Terhadap Daya Beli Masyarakat Di Indonesia : Tinjauan Literatur. 3(11).
- Widia Astuti, R., Sains Kharisma, A., Roni, Dumadi, & Nasirudin. (2019). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *Journal of Accounting and Finance (JACFIN)*, 1, 85–95.
- Wulandari, P., Golda Karnendra, D., Yusuf Albani, M., Nur Anggraeni, F., Diary Br Pangaribuan, A., Akbar Eka Pratama, M., & STIA LAN Jakarta, P. (2025). Dampak Kebijakan Kluster Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada Bahan Pokok terhadap Daya Beli Masyarakat di DKI Jakarta. In *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* (Vol. 7, Number 2). <https://doi.org/10.32834/jbest.v7i2.983>